

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis dan golongan. Salah satu negara terbesar di dunia Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Beragam budaya dari berbagai lapisan masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistik dan materialistik masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami istri telah terikat dalam sebuah keluarga. Suami istri menjadi pengatur keluarga yang menentukan arah tujuan untuk menciptakan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak hanya sebatas dalam hal hubungan kekeluargaan, terlebih dari itu juga dalam bidang harta kekayaannya.

Menurut hukum logika tidak bisa dikaitkan dengan pendapat Ter Haar yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan masyarakat termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi.³ Dalam

¹Sayuti Thalib. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press. Hal. 47

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³Ter Haar. 1960. *Asas-asas Susunan Hukum Adat*. Terjemahan Soebakti Poesponoto K. Ng. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 158

pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 35 menyatakan bahwa: *“harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”*. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakukan persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami istri. Sedangkan perceraian menurut Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas penulis mengambil judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERCERAI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak suami istri dalam pembagian harta bersama setelah bercerai?
2. Bagaimana akibat hukum setelah dilakukan pembagian harta bersama suami istri tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak suami istri dalam pembagian harta bersama setelah bercerai.

2. Untuk mengetahui hukum setelah dilakukan pembagian harta bersama suami istri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana menuangkan ide, dan pemikiran serta gagasan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hak-hak suami istri dalam pembagian harta bersama suami istri dalam perkawinan setelah bercerai khususnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak suami istri dalam pembagian harta bersama suami istri dalam perkawinan setelah bercerai, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk peduli terhadap penanganan kasus dan mampu memandang menyikapi serta bijak dalam menanggapi permasalahan ini.

3. Bagi Ilmu Pendidikan

Pengetahuan hukum untuk menambah kontribusi hukum Indonesia khususnya perkawinan dalam harta bersama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistemika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu metode yang hendak di pakai, adapun metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan normatif karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum dalam pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai Proses Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Bercerai.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan baku penelitian:

⁴ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, hal 4.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Reglemen Acara Perdata (Rv);
- c) Het Haerziene Reglement (HIR);
- d) Undang-undang Nomor 22, Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f) Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 tentang Pencatatan Nikah;
- g) Yurisprudensi

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu: Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedi;
- c) Media cetak dan elektronik.

b. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer

1) Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Beberapa masyarakat yang terdiri dari golongan masyarakat yang berbeda beserta hakim yang menetapkan putusan di Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan
- b. Penelitian lapangan

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis peraturan, buku-buku/literatur yurisprudensi yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai dan dalam memperoleh pendapat responden di lapangan tentang proses penyelesaian pembagian harta bersama setelah bercerai, kemudian dianalisa secara kualitatif dicari pemecahannya, serta pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah yang terdiri lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perkawinan
- B. Pengertian Harta Bersama Suami Istri dalam Perkawinan
- C. Pengertian Perceraian
- D. Macam-macam Harta Bersama Suami istri
- E. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan
- F. Akibat Hukum Setelah Berceraai
- G. Akibat Hukum Setelah Harta Bersama itu dibagi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Hasil Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran